



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DP2KBP3A 2025**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN SUMBAWA

Alamat : Jln. Durian Nomor 75 Sumbawa Besar

Berita Acara Verifikasi / Reviu
Capaian Kinerja Dokumen LKjIP Dinas P2KBP3A
Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-2-2025) telah melakukan verifikasi atau Reviu atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

1. dr. Hj. Nieta Ariyani NIP. 197805112003122007 Jabatan : Sekretaris	1 
2. A.A.NGR. Ketut Riyadi, S.KM, M.Kes NIP. 19690719 199203 1 007 Jabatan : Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 
3. Supri, S.Pt. NIP. 197910152009011002 Jabatan : Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	3 
4. Tati Haryati, S.Psi NIP. 19770515 200501 2 020 Jabatan : Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	4 
5. Abdul Munir, S.ST.,M.M.Inov NIP. 19730424 199403 1 005 Jabatan : Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan	5

Mengetahui:
Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



JUNAEDI, S.Si.APt., M.Si
NIP. 19690919 200003 1 004

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan tuhan Yang Maha Esa, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan. sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar,

Februari 2026

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



JUNAEDI, S.Si.APt., M.Si

NIP. 19690919 200003 1 004

Daftar Isi

Berita Acara Verifikasi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A	2
1.3. Issu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2025-2029	12
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
BAB IV PENUTUP	84

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	3
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	4

IKhtisar Eksekutif

Salah satu azas umum penyelenggaraan negara adalah akuntabilitas. Azas akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang dijalankan, dalam konteks penerapan tata pemerintahan yang baik mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. lebih lanjut berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 mengisyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini disusun.

LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 ini menyajikan berbagai capaian kinerja sebagai kebutuhan untuk analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Capaian-capaian kinerja yang tergambar dari ukuran indikator-indikator kinerja sasaran sesungguhnya merupakan kinerja seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2025 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2025 dikaitkan dengan Rencana Kinerja 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2025-2029 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2025, selama periode ini Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan 10 Program, 25 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan untuk memenuhi 5 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran strategis, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 23.604.534.260 meliputi belanja pegawai Rp. 8.799.665.660 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 13.035.645.921,28 dan belanja modal Rp. 1.769.222.678,72.

Secara parsial dan simultan hasil penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan tolok ukur dan target kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dapat dikatakan berhasil.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada kepala Pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran, perangkat daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra PD, Renja PD, PK, dan RKT.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan amanah. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Untuk memastikan keseluruhan program, dan kegiatan pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dapat terlaksana sesuai dengan target waktu, Kuantitas dan kualitas sasaran, maka dibuatlah perjanjian antara kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dengan Bupati, dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat individu pegawai yang tertuang dalam

perjanjian kinerja. Sehingga Setiap penyelenggara negara dan pemerintah mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan, serta setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat / masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

1.2. Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa melaksanakan dua tugas pokok yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

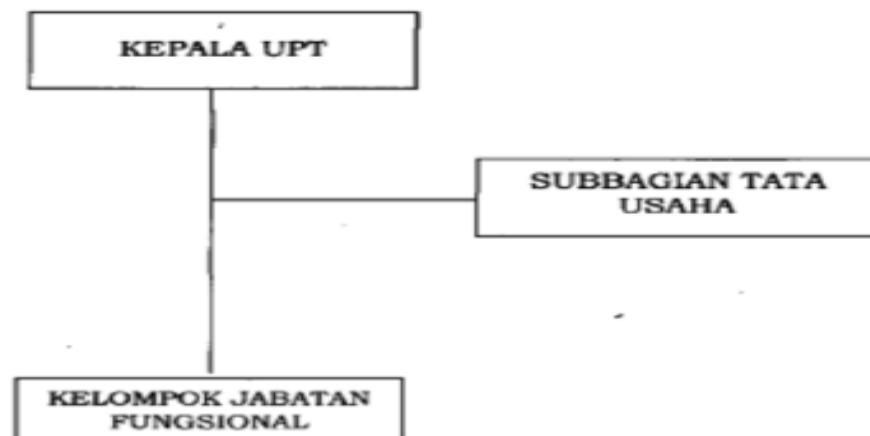
A. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan

- kelompok jabatan fungsional yaitu :
 - a. Perencana Ahli Muda, dan
 - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan terdiri atas kelompok jabatan fungsional yaitu :
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.
 - b. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.
 - c. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri atas:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) terdiri atas:
 - Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

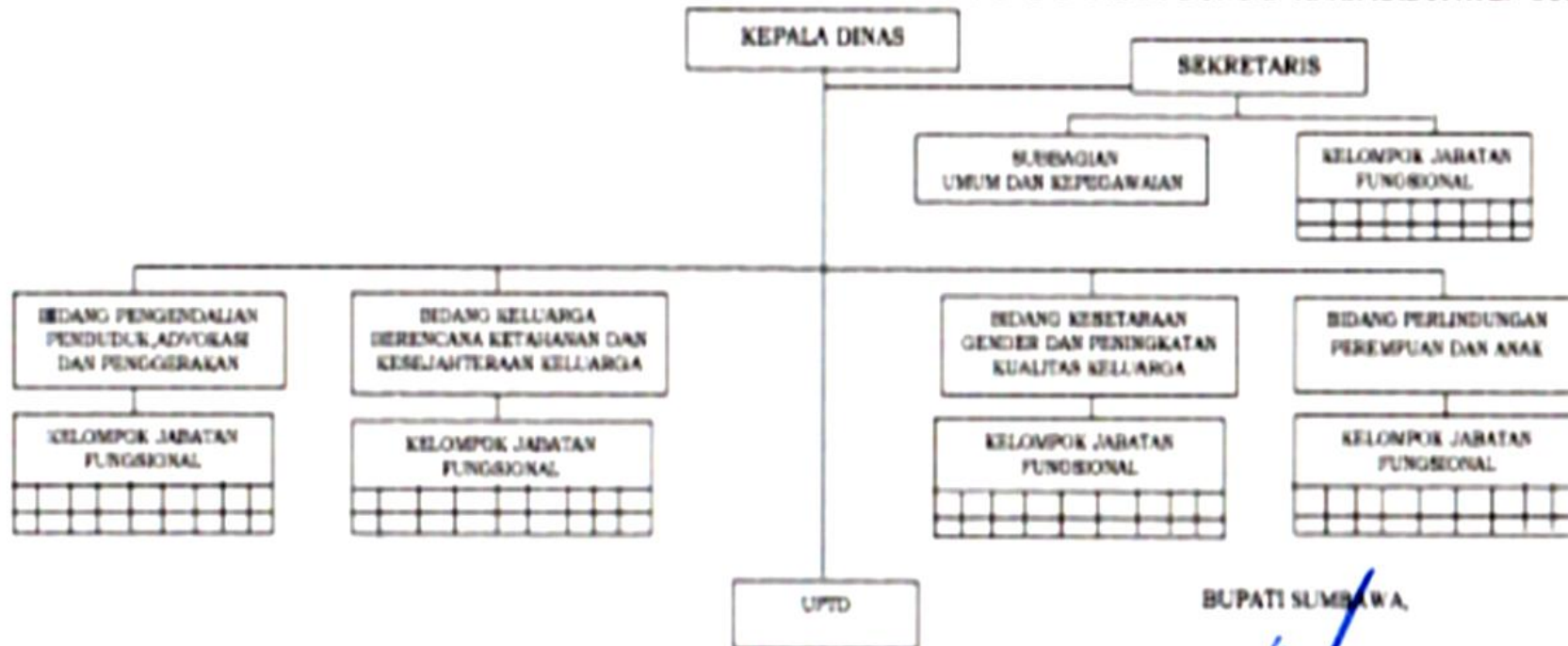
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 63 TAHUN
 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
 BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing dari sekretaris dan kepala bidang pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
3. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumbawa, Adapun tugas dan fungsi unit pelaksana teknis berdasarkan peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut :

a. UPT KB dan PPPA

Tugas dari kepala unit pelaksana teknis KB dan PPPA melaksanakan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis keluarga berencana menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan rencana kerja UPT Keluarga Berencana
2. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
3. Penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
4. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
6. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. UPTD PPA

Tugas dari kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT perlindungan perempuan dan anak
2. Menyusun program kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
3. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus
4. Mengevaluasi hasil kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
5. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT perlindungan perempuan dan anak

6. Melaksanakan administrasi UPT perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.3. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengendalian Penduduk	1. Pembangunan masih belum berwawasan kependudukan	1. Data dan Informasi Kependudukan yang Belum Sepenuhnya Terintegrasi dan Dimanfaatkan
2.	Keluarga Berencana	2. Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB belum optimal	2. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan 3. Kesertaan pria dalam ber-KB masih rendah 4. Persentase Unmeet Need masih tinggi 5. Belum semua klinik KB tersedia Tenaga medis yang berkualitas 6. Tenaga medis yang dilatih CTU (Contraception Technology Update) masih kurang
3.	Keluarga Sejahtera	3. Pemberdayaan dan Peningkatan KS	7. Pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) Tribina (BKB, BKL. Dan BKR) belum optimal. 8. Belum optimalnya peran kelompok kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga 9. Kualitas kelompok Bina keluarga belum optimal 10. Pembinaan terhadap kader belum optimal 11. Akses permodalan untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera kurang (UPPKS)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Kualitas Hidup Perempuan	4. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	12. Belum maksimalnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan 13. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya 14. Masih kurangnya perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)
5.	Perlindungan perempuan	5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan	15. Sarana dan prasarana penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan belum optimal
6.	Kualitas Keluarga	6. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	16. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang
7.	Pemenuhan Hak Anak	7. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	17. Belum terpenuhinya hak-hak anak sesuai standar
8.	Perlindungan Khusus Anak	8. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak	18. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak kurang optimal 19. Lembaga penanganan kasus anak di tingkat kecamatan dan desa kurang
9.	Sistem Data Gender dan Anak	9. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	20. Sumberdaya pengolah data yang kurang baik dari sisi anggaran maupun SDMnya
10.	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal	10. Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	21. Penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi belum optimal 22. Sarana prasarana perangkat daerah masih kurang Penerapan sistem informasi pelayanan perangkat daerah belum optimal

Berdasarkan tabel permasalahan diatas maka isu strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) perlu benar-benar terintegrasi dan diimplementasikan dalam rencana pembangunan

2. Rendahnya angka kesertaan KB aktif dan baru karena Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga
3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan keluarga dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan
4. Tidak semua perempuan, bahkan yang aktif di ormas, memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk berpolitik secara efektif, seperti lobi, negosiasi, atau penyusunan kebijakan
5. Layanan terpadu masih belum optimal, Kualitas layanan yang bervariasi, kurangnya tenaga profesional terlatih, dan keterbatasan fasilitas sering menjadi kendala
6. Stereotip gender yang mengakar kuat dapat membatasi potensi anggota keluarga, menghambat perempuan untuk berpartisipasi penuh di ruang publik, dan membebankan peran ganda yang tidak adil
7. Meningkatkan pemenuhan hak anak diantaranya pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
8. Melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran melalui program-program perlindungan anak
9. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak belum optimal
10. Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan dua (2) urusan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

2.1. Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2025-2029, yaitu Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera, yang dilaksanakan melalui 6 Misi yaitu (a) pembangunan sosial dan ekonomi, (b) penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, (c) reformasi tata kelola pemerintahan, (d) stabilitas demokrasi, (e) pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dan (f) kesinambungan pembangunan antar periode.

a. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesesuaian dengan kewenangan dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Adapun tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan Perempuan Serta perlindungan dan Pemenuhan Hak anak		Indikator Tujuan: Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indikator Sasaran 1 : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) : Merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Rumus : Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketentraman; (b) Dimensi Kemandirian (c) Dimensi Kebahagiaan (Keterangan: Formula iBangga: $iBangga = \frac{1}{3} (\text{Indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{Indeks kebahagiaan}) \times 100$
		Indikator Tujuan: Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
	Sasaran 2 : Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indikator Sasaran 2 : Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender : Salah satu ukuran penting dalam pembangunan manusia yang berfokus pada kesetaraan gender . Digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi secara khusus menyoroti kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan Rumus $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - Laki}} \times 100$

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
		Indikator Tujuan: Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
	Sasaran 3: Terselenggara nya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Indikator Sasaran 3 : Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	Skor Kabupaten Layak Anak : Adalah penilaian terhadap tingkat pemenuhan hak-hak anak di suatu kabupaten/kota, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia Rumus Dilakukan melalui proses evaluasi kuantitatif dan kualitatif berdasarkan 24 indikator utama yang terbagi ke dalam 5 klaster hak anak . Proses ini mengikuti pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA RI) .
		Indikator Tujuan : Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara		
	Sasaran 4: Meningkatn ya Profesionali tas ASN PD	Indikator Sasaran 4 : Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD : Sebuah nilai atau skor yang menggambarkan seberapa profesional seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indeks ini penting karena menjadi salah satu alat ukur utama bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas dan kapasitas birokrasi, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah.
		Indikator Tujuan: Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
	Sasaran 5: Meningkatn ya akuntabilit as kinerja PD	Indikator Sasaran 5 : Kategori AKIP	Kategori	Kategori AKIP: Merupakan kategori kualitas SAKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) “ Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang <u>Catatan:</u> Kategori SAKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, maka dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan sebelumnya

yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Integrasi data kependudukan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan	Menyusun dan mengimplementasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di tingkat daerah	Optimalisasi promotif preventif (penurunan stunting, imunisasi, gizi seimbang).
		Meningkatkan partisipasi dan kualitas pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pembinaan berkelanjutan	Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
		Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Edukasi dan sosialisasi 8 fungsi keluarga (agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan)	
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Penyusunan dan penguatan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di setiap OPD	Pelatihan keterampilan ekonomi dan permodalan mikro bagi perempuan.
		Melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye anti kekerasan berbasis gender	Kampanye kesadaran tentang hak-hak perempuan di masyarakat, sekolah, dan tempat kerja dan Promosi	

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
			nilai-nilai kesetaraan gender dan penghapusan stigma terhadap korban kekerasan	
		Menguatkan peran keluarga sebagai fondasi kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga serta masyarakat	Peningkatan peran keluarga dalam menjalankan fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan	
	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	Terpenuhinya hak-hak dasar anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, dan lingkungan yang layak demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal	Penguatan Layanan Terpadu PPA (Perlindungan Perempuan & Anak).
		Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.	Penguatan kelembagaan layanan perlindungan anak (UPTD PPA, P2TP2A, Forum Anak)	Kampanye edukasi pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan sekolah.
		Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak	Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur secara sistematis	

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
Tata Kelola manajemen internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Peningkatan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan (Diklat, Bimtek, e-learning)	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai (RKJ) dan manajemen talenta OPD.	Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis Perangkat Daerah
				Implementasi reward & punishment berbasis kinerja
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah	Penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap Perangkat Daerah
				Evaluasi kinerja berkala, pelaporan berbasis aplikasi online
				Integrasi e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev.
				Pelibatan masyarakat & akademisi dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas P2KBP3A 2021-2026, maka penetapan kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Dinas P2KBP3A
Kabupaten Sumbawa Tahun 2025
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas P2KBP3A 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program	Anggaran
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,76	Persen	Program Pengendalian Penduduk	1.516.975.000
					Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.545.499.250
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	89,00	Persen	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.657.445.000
					Program peningkatan Kualitas Keluarga	18.135.000
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	A	Kategori	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.019.057.576
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	14,00	Persen	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	50.761.888
					Program Perlindungan Perempuan	191.389.000
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	754	Nilai	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	14.615.000
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	123.038.500
					Program Perlindungan Khusus Anak	238.824.000

Kemudian Sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas P2KBP3A 2025-2029, maka Penetapan Kinerja pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4. Indikator Kinerja Dinas P2KBP3A
Kabupaten Sumbawa Tahun 2025
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas P2KBP3A 2025-2029**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,87	Poin	Program Pengendalian Penduduk	1.486.650.000
					Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.691.983.000
					Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.647.910.000
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	94,98	Poin	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	24.130.000
					Program Perlindungan Perempuan	190.324.000
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	9.915.000
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	629	Nilai	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	82.311.500
					Program Perlindungan Khusus Anak	238.081.000
					Program peningkatan Kualitas Keluarga	79.123.000
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Rendah	Kategori	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	BB	Kategori	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.154.106.760

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Interval		Kriteria Penilaian	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan / atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 diukur berdasarkan tingkat capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 serta Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa nomor 47 tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten

sumbawa, adapun capaian sasaran strategis kinerja utama Dinas P2KBP3A pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisai	Capaian
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2,76	2,18	126,81
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	89,00	11,20	12,58
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	A	BB	93,47
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	Persen	14,00	34,53	246,64
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	754	550,20	72,97
Rata - Rata			%	110,50		
Tinggi			%	246,64		
Rendah			%	12,58		

Berdasarkan tabel 3.2 capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebesar 110,50% dengan nilai capaian terendah pada indikator Cakupan Keluarga Sejahtera 12,58% dan capaian tertinggi pada indikator kinerja Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD mencapai 246,64%. Tingginya capaian Indikator kinerja Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah perangkat daerah yang telah menyusun dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sehingga jumlah anggaran yang dapat dihitung sebagai anggaran responsif gender meningkat.

Selanjutnya capaian sasaran strategis kinerja utama berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa 2025-2029 yang juga tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A Tahun 2025-2029**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	63,87	72,90	114,14
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,98	94,96	99,98
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	629	550,20	87,47
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Rendah	Sedang	114,26
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	Kategori	BB	BB	100,00
Rata - Rata			%	103,07		
Tinggi			%	114,26		
Rendah			%	87,47		

Berdasarkan tabel 3.3 capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029, rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebesar 103,07% dengan nilai capaian terendah pada indikator Skor Kabupaten Layak Anak 87,47% dan capaian tertinggi pada indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mencapai 114,14%. Tingginya capaian Indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) ini disebabkan oleh beberapa hal seperti tingginya kesadaran masyarakat terhadap metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), yang membantu keluarga mengatur jarak kelahiran dan meningkatkan kualitas pengasuhan, penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) untuk mencegah pernikahan dini, yang merupakan salah satu variabel penting dalam dimensi ketentraman. Tingginya capaian iBangga bukan hanya soal angka statistik, melainkan refleksi dari keberhasilan dalam mengubah perilaku masyarakat untuk lebih peduli pada perencanaan keluarga dan kualitas pengasuhan anak.

Terhadap indikator sasaran strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis dan akan disajikan secara lengkap berdasarkan:

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
- b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
- d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
- e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;
- f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara lengkap tabel Indikator Utama (IKU) dan Indikator Utama Perubahan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Dalam dunia penelitian, definisi operasional adalah jembatan yang menghubungkan konsep abstrak dengan kenyataan praktis. Sederhananya, ini adalah panduan tentang bagaimana cara mengukur atau mengamati sebuah variabel secara nyata di lapangan, berdasarkan pernyataan tersebut berikut disajikan definisi operasional dan tata cara pengukuran kinerja pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi ⁷	Penanggung Jawab Data	Sumber Data
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun)	$TFR = \frac{1}{1.000} \times \left[5 \sum_{i=1} \right] ASFR_i$	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan	DP2KBP3A/ BKKBN
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	Keluarga Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan baik dari segi ekonomi social dan budaya	$\text{Persentase Keluarga Sejahtera} = \frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah Keluarga (KK)}} \times 100$	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendataan Keluarga
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah	Komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%). Kategori Penilaian: Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai = 90-100, Predikat A (Memuaskan) - Nilai >80-90, Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai >70- 80, Predikat B (Baik) - Nilai >60-70, Predikat CC (Cukup) - Nilai >50-60	Sekretaris	Inspektorat
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda.	$\text{Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD} = \frac{\text{Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD}}{\text{Jumlah Seluruh Belanja Langsung APBD}} \times 100$	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	DP2KBP3A

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab Data	Sumber Data
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan	Komponen yang dinilai, yaitu 1. Kelembagaan (16,40%) dengan nilai maksimal 164 Poin, 2. Hak Sipil dan Kebebasan (11,50%) dengan nilai maksimal 115 Poin, 3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (15,60%) dengan nilai maksimal 156 Poin, 4. Kesehatan dan Kesejahteraan (15,00%) dengan nilai maksimal 150 Poin, 5. Pendidikan, Pemfaatan Waktu Luang (11,00%) dengan nilai maksimal 110 Poin, 6. Perlindungan Khusus (20,50%) dengan nilai maksimal 205 Poin, 7. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan (10,00%) dengan nilai maksimal 100 Poin	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kementerian PPA

Tabel 3.5. Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab Data	Sumber Data
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketentraman; (b) Dimensi Kemandirian (c) Dimensi Kebahagiaan $iBangga = \frac{1}{3} (\text{Indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{Indeks kebahagiaan}) \times 100$	1. Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan 2. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP3A/ BKKBN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab Data	Sumber Data
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Salah satu ukuran penting dalam pembangunan manusia yang berfokus pada kesetaraan gender. Digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi secara khusus menyoroti kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - Laki}} \times 100$	1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kementerian PPA
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	Adalah penilaian terhadap tingkat pemenuhan hak-hak anak di suatu kabupaten/kota, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia	Dilakukan melalui proses evaluasi kuantitatif dan kualitatif berdasarkan 24 indikator utama yang terbagi ke dalam 5 kluster hak anak. Proses ini mengikuti pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA RI)	1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kementerian PPA
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Sebuah nilai atau skor yang menggambarkan seberapa profesional seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indeks ini penting karena menjadi salah satu alat ukur utama bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas dan kapasitas birokrasi, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD dirilis oleh BKPSDM	Sekretaris	DP2KBP3A/B KPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab Data	Sumber Data
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	Merupakan kategori kualitas SAKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) “ Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang	Kategori SAKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah	Sekretaris	DP2KBP3A/INSPEKTORAT

b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 disusun sesuai Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis daerah Tahun 2025. Pengukuran dilakukan berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas P2KBP3A Tahun 2025-2029 dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja pada masing-masing indikator sasaran strategis tahun 2025.

**Tabel 3.6. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisai	Capaian	Kriteria
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2,76	2,18	126,81	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	89	11,2	12,58	Sangat Rendah
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	A	BB	93,47	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	Persen	14	34,53	246,64	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	754	550,2	72,97	Sedang
Rata - Rata			%	110,50			
Tinggi			%	246,64			
Rendah			%	12,58			

Berdasarkan tabel 3.6 capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026, masih ada yang kategori capaiannya masih sangat rendah yaitu indikator Cakupan Keluarga Sejahtera dan sedang pada indikator Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak. Untuk indikator Cakupan Keluarga Sejahtera diakui cukup sulit untuk mencapai target karena untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga butuh peran yang lebih banyak pada perangkat daerah lain yang berkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi

masyarakat, sedangkan untuk Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak masih terdapat kendala dalam peningkatan nilai kelembagaan KLA di Kabupaten Sumbawa dimana masih ada regulasi yang belum bisa ditetapkan karena berbagai permasalahan yang muncul, salah satunya peraturan daerah tentang KLA yang selalu batal untuk dibahas dan disahkan.

Tabel 3.7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisai	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	63,87	72,90	114,14	Sangat Tinggi
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,98	94,96	99,98	Sangat Tinggi
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	629	550,20	87,47	Tinggi
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Rendah	Sedang	114,26	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	Kategori	BB	BB	100,00	Sangat Tinggi
Rata - Rata			%	103,07			
Tinggi			%	114,26			
Rendah			%	87,47			

Berdasarkan tabel 3.7 capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029, kategori capaiannya tinggi dan sangat tinggi, hal ini disebabkan karena penyesuaian target dari renstra 2021-2026, selain itu upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi oleh seluruh jajaran Dinas P2KBP3A untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun n dengan tahun n-1

Perkembangan capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dari tahun 2024 hingga 2025 berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa 2021-2026, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun n-1 2024	Capaian Tahun n 2025	Naik / Turun
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2,45	2,18	-0,28
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	83,97	11,20	-72,77
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	3,06
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	Persen	69,22	34,53	-34,69
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	775,46	550,20	-225,26

Berdasarkan tabel 3.8 capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026, dapat dilihat kenaikan dan penurunan kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2024 adapun indikator yang mengalami kenaikan dan penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Angka Kelahiran Total (TFR) mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dari angka 2,45% tahun 2024 menjadi 2,18% tahun 2025, seperti yang terlihat pada tabel diatas capaian indikator ini -0,28% meskipun perbandingannya menurun dari tahun sebelumnya tetapi capaian indikator ini semakin rendah semakin baik capaiannya.
2. Cakupan Keluarga Sejahtera mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya dari angka 83,97% tahun 2024 menjadi 11,20% tahun 2025, terjadi penurun kinerja sebesar -72,77%.
3. Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A mengalami kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya meski terlihat capaian predikat AKIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tetap BB namun secara nilai mengalami peningkatan sebesar 3,06 poin.

4. Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD indikator ini juga mengalami penurunan kinerja dari 69,22% tahun 2024 menjadi 34,53% tahun 2025 atau turun sebesar 34,69%
5. Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak mengalami penurunan capaian kinerja dari 775,46 tahun 2024 menjadi 550,20 tahun 2025 atau turun sebesar -225,26 poin

Selanjutnya Perkembangan capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dari tahun 2024 hingga 2025 berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa 2025-2029, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun n-1 2024	Capaian Tahun n 2025	Naik / Turun
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	62,62	72,90	10,28
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,79	94,96	0,17
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	503,00	550,20	3,06
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sangat Rendah	Sedang	11,82
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	Kategori	BB	BB	3,06

Berdasarkan tabel 3.9 capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029, dapat dilihat dari 5 (lima) indikator yang ditetapkan semuanya mengalami peningkatan capaian kinerja.

a. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Akhir Renstra

Realisasi Indikator kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA (2021-2026) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Pembandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahun Akhir	Realisasi Tahun n (2025)	Keterangan
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2,76	2,18	Tercapai
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	89,00	11,20	Belum Tercapai
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	A	BB	Belum Tercapai
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	Persen	14,00	34,53	Tercapai
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	754,00	550,20	Belum Tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026, dari 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan ada 3 (tiga) indikator yang belum tercapai yaitu 1). Cakupan Keluarga Sejahtera, 2). Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A, dan 3). Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak.

Realisasi Indikator kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA (2025-2029) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11 Pembandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahun Akhir	Realisasi Tahun n (2025)	Keterangan
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	69,14	72,90	Tercapai
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,74	94,96	Belum Tercapai
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	921	550,20	Belum Tercapai
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	Sedang	Tercapai
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	Kategori	BB	BB	Tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029, dari 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan ada 2 (dua) indikator yang belum tercapai yaitu 1). Indeks Pembangunan Gender, 2). Skor Kabupaten Layak Anak.

b. Pembandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun n Dengan Kinerja Provinsi dan Target Nasional Tahun n

Realisasi Indikator kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berdasarkan RENSTRA (2021-2026) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Kinerja Provinsi Dan Target Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun n (2025)	Realisasi Pem Prov Tahun n (2025)	Realisasi Nasional Tahun n (2025)	Keterangan
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2,18	6,2	2,7	Pemutakhiran PK-25
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	11,20	-	-	Tidak dilakukan perbandingan

3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	-	-	Tidak dilakukan perbandingan
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	Persen	34,53	8,53	-	
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	550,20	-	-	Tidak dilakukan perbandingan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capai kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 berdasarkan RENSTRA (2021-2026) jika dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, ada 3 (tiga) indikator yang tidak dilakukan perbandingan karena data 2 (dua) indikator tersebut tidak ditemukan pada capaian kinerja pemerintah provinsi dan pusat.

Realisasi Indikator kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berdasarkan RENSTRA (2025-2029) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Kinerja Provinsi Dan Target Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun n (2025)	Realisasi Pem Prov Tahun n (2025)	Realisasi Nasional Tahun n (2025)	Keterangan
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	72,90	63,7	67,3	Hasil Pemutakhiran PK-25
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,96	91,54	91,85	Rilis Kementerian PPA RI
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	550,20	-	-	Tidak dilakukan perbandingan
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	-	-	Tidak dilakukan perbandingan
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	Kategori	BB	-	-	Tidak dilakukan perbandingan

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahawa capai kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 berdasarkan RENSTRA (2025-2029) jika dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dari 5 (lima) indikator yang ditetapkan ada 2 (dua) indikator yang dapat dilakukan perbandingan yaitu indikator Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Pembangunan Gender sementara 3 indikator lainnya tidak dilakukan perbandingan karena tidak ditemukan pada capaian kinerja pemerintah provinsi dan pusat.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berikut ini akan diuraikan penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, dari penyebab tersebut akan ditentukan strategi pembangunan untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sumbawa. Adapun penyebab keberhasilan dan kegagalan serta strategi yang akan dilakukan adalah seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.14 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,18	1	Angka ber-KB yang tidak terpenuhi	1 Menurunkan angka ber-KB yang tidak terpenuhi dengan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
				2	Peran/fungsi penyuluh lapangan KB (PLKB) belum optimal, baik dari kuantitas maupun kualitasnya	2 Optimalisasi peran tenaga lini lapangan dalam penurunan unmet need melalui penajaman sasaran unmetneed by name by address untuk diberikan KIE KB.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
				3	Tingkat pelayanan KB pasca persalinan masih rendah	4	Meningkatkan KB pascapersalinan untuk menjaga jarak kelahiran melalui pendampingan ibu hamil oleh PKB/PLKB, PPKBD dan sub PPKBD;
				4	Masih terjadinya perkawinan usia muda	5	Meningkatkan promosi pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan berkeluarga bagi remaja
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera	11,20	1	Belum semua peserta KB dari kelompok masyarakat miskin mendapat penguatan untuk peningkatan kesejahteraan	1	Merencanakan sosialisasi dan pendampingan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	1	Dokumen perencanaan masih belum menggambarkan perencanaan kinerja tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang	1	Menyusun LKjIP perangkat daerah tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru
				2	Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi		
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Proporsi Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD	34,53	1	Perencanaan dan penganggaran responsif gender baru menjadi kepedulian beberapa unit kerja dan belum menyeluruh	1	Pendampingan penyusunan PPRG kepada seluruh perangkat daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
				2	Adanya keterbatasan pengetahuan aparaturnya pada perangkat daerah	2	Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan PPRG
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai Hasil Pengukuran Indikator Kabupaten Layak Anak	550,2	1	Kelembagaan KLA di level kabupaten belum sepenuhnya dapat berjalan, seperti di dalam internal kelembagaan itu sendiri belum berjalan koordinasi yang baik antar OPD yang merupakan bagian dari Gugus Tugas KLA.	1	Meningkatkan peran Bappeda sebagai ketua Gugus Tugas KLA untuk mengoptimalkan koordinasi antar OPD yang tergabung di dalam Gugus Tugas KLA
				2	Masih banyak aturan yang belum terbentuk untuk mendukung terwujudnya KLA		Menyusun dan mengusulkan rancangan pembentukan regulasi yang menunjang terwujudnya KLA
				3	Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan klaster belum maksimal. Hal ini ditunjukkan pencapaian tiap-tiap klaster belum terpenuhi secara keseluruhan dan masih dibawah target rencana pencapaian yang telah ditetapkan.		Melakukan pemetaan terhadap hak anak yang belum terpenuhi berdasarkan klaster dan melakukan advokasi kepada instansi dan stakeholder terakit untuk penuhannya dan disertai data dukung yang valid.
				4	Belum optimalnya SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) Peran Lembaga Masyarakat, OPD lain, Dunia Usaha dan Media Massa		Melakukan refreasing terhadap tenaga yang pernah dilatih konvensi hak anak dan melakukan pelatihan untuk yang belum pernah mendapatkan pelatihan konvensi hak anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
				5	Keikutsertaan perwakilan anak dalam forum musrenbang hanya seremonial, sementara suara anak dalam forum musrenbang belum dapat di realisasikan secara nyata		Melakukan advokasi untuk terkait pemenuhan aspirasi atau suara anak yang di sampaikan dalam forum musrenbang

Tabel 3.14 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Berdasarkan Renstra Dinas P2KBP3A 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	72,9	1	Keberhasilan Dimensi Ketenteraman Dimensi ini mencerminkan sejauh mana keluarga merasa aman dan memiliki pegangan nilai	1	Optimalisasi Peran Kampung KB sebagai Pusat Data dan Aksi
				2	Penguatan Dimensi Kemandirian Keluarga yang mandiri mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa ketergantungan ekstrem pada pihak luar	2	Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Dimensi Kemandirian)
				3	Keberhasilan Dimensi Kebahagiaan Dimensi ini bersifat psikososial dan sangat bergantung pada kualitas hubungan antarmanusia	3	Edukasi Parenting Modern (Dimensi Kebahagiaan)
						4	Peningkatan Akses Layanan Dasar (Dimensi Ketenteraman)
						5	Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	94,96	1	Masih adanya jarak yang lebar antara jumlah perempuan yang bekerja dengan laki-laki	1	Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Kebijakan
				2	Adanya perbedaan pendapatan untuk jenis pekerjaan dan beban kerja yang sama	2	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Dimensi Standar Layak Hidup)
				3	Dominasi perempuan di sektor informal yang minim perlindungan hukum dan jaminan sosial dibandingkan laki-laki yang lebih banyak di sektor formal	3	Peningkatan Kualitas SDM (Dimensi Pengetahuan)
				4	Angka putus sekolah pada anak perempuan, seringkali dipicu oleh pernikahan dini	4	Optimalisasi Layanan Kesehatan Reproduksi (Dimensi Umur Panjang)
					Ketersediaan fasilitas publik yang aman bagi perempuan (misalnya transportasi umum yang aman, ruang laktasi, dan <i>daycare</i>) sangat mendukung perempuan untuk aktif di ruang publik	5	Transformasi Budaya dan Komunikasi Publik
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	550,20	1	Komitmen Politik dan Kelembagaan	1	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan (Faktor Utama)
				2	Capaian pada 5 Klaster Substantif	2	Standarisasi Fasilitas Publik (Infrastruktur Ramah Anak)
				3	Partisipasi Anak (Forum Anak)	3	Solusi pada Klaster Perlindungan Khusus
				4	Sinergi Pentahelix	4	Optimalisasi Partisipasi Anak (Forum Anak)
						5	Strategi Kolaborasi dengan Sektor Non-Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Sedang	1	Ketersediaan dan Akses Pengembangan Kompetensi (Dimensi Kompetensi)	1	memastikan setiap pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatannya
				2	Kinerja Organisasi dan Individu (Dimensi Kinerja)	2	Akselerasi Kompetensi
				3	Penegakan Disiplin dan Kode Etik (Dimensi Disiplin)	3	Memastikan penilaian kinerja tidak hanya sekedar formalitas
				4	Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan (Dimensi Kualifikasi)	4	Menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan
						5	Pemutakhiran Data Mandiri (PDM)
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	BB	1	Dokumen perencanaan masih belum menggambarkan perencanaan kinerja tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang	1	Menyusun LKjIP perangkat daerah tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru
				2	Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi		

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun n

Dari sisi efisiensi, kondisi ini menggambarkan adanya ketidak seimbangan antara belanja penunjang (supporting) dengan belanja yang secara langsung berdampak pada output dan outcom. Apabila kondisi ini berlanjut, maka terdapat risiko tidak optimalnya pencapaian sasaran strategis daerah, Berikut ini analisis kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tahun 2025 dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas P2KBP3A Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	13.158.707.130	11.826.543.000	8.353.155.272	89,88	70,63	3.473.387.728	29,37	Kepala Dinas
1.1.	PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1.414.650.000	1.486.650.000	697.677.654	105,09	46,93	788.972.346	53,07	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerrakan
1.1.1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	1.414.650.000	1.486.650.000	697.677.654	105,09	46,93	788.972.346	53,07	
1.1.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.050.000	60.050.000	47.183.500	100,00	78,57	12.866.500	21,43	
1.1.1.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	166.600.000	166.600.000	151.200.000	100,00	90,76	15.400.000	9,24	
1.1.1.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.188.000.000	1.260.000.000	499.294.154	106,06	39,63	760.705.846	60,37	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
1.2.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)	3.761.111.000	3.113.708.000	2.304.782.068	82,79	74,02	808.925.932	25,98	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
		Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	2.590.536.130	3.050.275.000	1.637.414.410	117,75	53,68	1.412.860.590	46,32	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerrakan
		Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	528.000.000	528.000.000	524.370.000	100,00	99,31	3.630.000	0,69	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerrakan
1.2.1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1.951.836.130	1.994.575.000	1.085.550.610	102,19	54,43	909.024.390	45,57	
1.2.1.1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1.198.200.000	1.191.000.000	845.459.657	99,40	70,99	345.540.343	29,01	
1.2.1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi	545.871.130	546.210.000	141.105.050	100,06	25,83	405.104.950	74,17	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
	Lokakarya (Minilok)	Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
1.2.1.3	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	72.650.000	72.650.000	41.250.153	100,00	56,78	31.399.847	43,22	
1.2.1.4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	135.115.000	184.715.000	57.735.750	136,71	31,26	126.979.250	68,74	
1.2.2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	638.700.000	1.055.700.000	551.863.800	165,29	52,27	503.836.200	47,73	
1.2.2.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	291.200.000	291.200.000	82.701.300	100,00	28,40	208.498.700	71,60	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
1.2.2.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	347.500.000	764.500.000	469.162.500	220,00	61,37	295.337.500	38,63	
1.2.3.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah laporan kinerja pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana	528.000.000	528.000.000	524.370.000	100,00	99,31	3.630.000	0,69	
1.2.3.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	528.000.000	528.000.000	524.370.000	100,00	99,31	3.630.000	0,69	
1.2.4.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Persentase kehamilan yang tidak direncanakan	3.761.111.000	3.113.708.000	2.304.782.068	82,79	74,02	808.925.932	25,98	
1.2.4.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.950.000	47.950.000	27.736.000	200,21	57,84	20.214.000	42,16	
1.2.4.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.692.701.000	3.021.298.000	2.237.150.318	81,82	74,05	784.147.682	25,95	
1.2.4.3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	14.500.000	14.500.000	12.450.000	100,00	85,86	2.050.000	14,14	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
1.2.4.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.960.000	29.960.000	27.445.750	100,00	91,61	2.514.250	8,39	
1.3.	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	2.587.200.000	2.587.200.000	2.459.170.000	100,00	95,05	128.030.000	4,95	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
		Indeks Lansia Berdaya	2.277.210.000	1.060.710.000	729.741.140	46,58	68,80	330.968.860	31,20	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
1.3.1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	2.277.210.000	1.060.710.000	729.741.140	46,58	68,80	330.968.860	31,20	
1.3.1.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	67.680.000	67.680.000	19.325.500	100,00	28,55	48.354.500	71,45	
1.3.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	846.300.000	863.030.000	582.765.640	101,98	67,53	280.264.360	32,47	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
1.3.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1.363.230.000	130.000.000	127.650.000	9,54	98,19	2.350.000	1,81	
1.3.2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berperan serta aktif dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.587.200.000	2.587.200.000	2.459.170.000	100,00	95,05	128.030.000	4,95	
1.3.2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.176.000.000	1.176.000.000	1.078.210.000	100,00	91,68	97.790.000	8,32	
1.3.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1.411.200.000	1.411.200.000	1.380.960.000	100,00	97,86	30.240.000	2,14	
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	216.654.000	224.369.000	202.312.349	103,56	90,17	22.056.651	9,83	Kepala Dinas

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
2.1	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Daerah	24.130.000	24.130.000	23.690.000	100,00	98,18	440.000	1,82	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas keluarga
2.1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelebagaan PUG (melalui pelatihan, bimtek, pendampingan)	10.000.000	9.755.000	9.461.000	97,55	96,99	294.000	3,01	
2.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2.500.000	1.720.000	1.646.500	68,80	95,73	73.500	4,27	
2.1.1.2	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	2.500.000	2.720.000	2.646.500	108,80	97,30	73.500	2,70	
2.1.1.3	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.500.000	1.720.000	1.646.500	68,80	95,73	73.500	4,27	
2.1.1.4	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.500.000	3.595.000	3.521.500	143,80	97,96	73.500	2,04	
2.1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi berbasis gender	14.130.000	14.375.000	14.229.000	101,73	98,98	146.000	1,02	
2.1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang	14.130.000	14.375.000	14.229.000	101,73	98,98	146.000	1,02	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
	dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi								
2.2	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	190.324.000	190.324.000	169.467.099	100,00	89,04	20.856.901	10,96	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
2.2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	62.290.000	51.025.000	48.971.532	81,92	95,98	2.053.468	4,02	
2.2.1.1	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	62.290.000	51.025.000	48.971.532	81,92	95,98	2.053.468	4,02	
2.2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	82.965.000	104.510.000	86.343.277	125,97	82,62	18.166.723	17,38	
2.2.2.1	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	2.476.000	2.476.000	-	100,00	0,00	2.476.000	100,00	
2.2.2.2	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan	8.700.000	8.700.000	6.375.000	100,00	73,28	2.325.000	26,72	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
		Tingkataten/Kota								
2.2.2.3	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	13.378.000	10.800.000	10.800.000	80,73	100,00	-	0,00	
2.2.2.4	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	8.480.000	6.480.000	6.391.000	76,42	98,63	89.000	1,37	
2.2.2.5	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	15.300.000	15.300.000	8.391.500	100,00	54,85	6.908.500	45,15	
2.2.2.6	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	8.066.000	52.688.000	46.451.277	653,21	88,16	6.236.723	11,84	
2.2.2.7	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	26.565.000	8.066.000	7.934.500	30,36	98,37	131.500	1,63	
2.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan	45.069.000	34.789.000	34.152.290	77,19	98,17	636.710	1,83	
2.2.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	45.069.000	34.789.000	34.152.290	77,19	98,17	636.710	1,83	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.3	PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak yang terintegrasi dalam SI	2.200.000	9.915.000	9.155.250	450,68	92,34	759.750	7,66	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas keluarga
2.3.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	2.200.000	9.915.000	9.155.250	450,68	92,34	759.750	7,66	
2.3.1.1	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.200.000	9.915.000	9.155.250	450,68	92,34	759.750	7,66	
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	455.296.282	399.515.500	341.643.060	87,75	85,51	57.872.440	14,49	Kepala Dinas
3.1	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan hak anak	65.276.500	82.311.500	80.068.000	126,10	97,27	2.243.500	2,73	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
3.1.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan skor/indeks komponen kelembagaan dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	9.050.000	15.735.000	14.954.500	173,87	95,04	780.500	4,96	
3.1.1.1	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	9.050.000	15.735.000	14.954.500	173,87	95,04	780.500	4,96	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan anak yang dilaksanakan	56.226.500	66.576.500	65.113.500	118,41	97,80	1.463.000	2,20	
3.2.1	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.195.500	35.195.500	34.599.500	100,00	98,31	596.000	1,69	
3.2.2	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	21.031.000	31.381.000	30.514.000	149,21	97,24	867.000	2,76	
3.2	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Median Usia Kawin Perempuan (MUKP)	5.550.000	79.123.000	73.806.000	1425,64	93,28	5.317.000	6,72	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas keluarga
3.2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan penyuluhan atau kelas keluarga sadar gender dan ramah anak	5.550.000	77.748.000	72.693.000	1400,86	93,50	5.055.000	6,50	
3.2.1.1	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan	5.550.000	77.748.000	72.693.000	1400,86	93,50	5.055.000	6,50	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
	Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Kabupaten/Kota								
3.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga (kader/fasilitator/relawan) yang mendapat pelatihan terkait KG dan hak anak	-	1.375.000	1.113.000	0,00	80,95	262.000	19,05	
3.2.2.1	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	-	1.375.000	1.113.000	0,00	80,95	262.000	19,05	
3.3	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	384.469.782	238.081.000	187.769.060	61,92	78,87	50.311.940	21,13	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
3.3.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan sosialisasi/edukasi pencegahan kekerasan	103.100.000	51.035.000	50.305.250	49,50	98,57	729.750	1,43	
3.3.1.1	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	103.100.000	51.035.000	50.305.250	49,50	98,57	729.750	1,43	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
3.3.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	227.004.000	152.255.000	105.898.810	67,07	69,55	46.356.190	30,45	
3.3.2.2	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000	30.600.000	26.400.000	102,00	86,27	4.200.000	13,73	
3.3.2.3	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	38.250.000	12.240.000	7.231.000	32,00	59,08	5.009.000	40,92	
3.3.2.4	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	17.400.000	8.700.000	-	50,00	0,00	8.700.000	100,00	
3.3.2.5	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	50.400.000	32.400.000	25.107.500	64,29	77,49	7.292.500	22,51	
3.3.2.6	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	68.026.000	56.776.000	39.752.729	83,46	70,02	17.023.271	29,98	
3.3.2.7	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah	2.476.000	930.000	-	37,56	0,00	930.000	100,00	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
	Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								
3.3.2.8	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20.452.000	10.609.000	7.407.581	51,87	69,82	3.201.419	30,18	
3.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak	54.365.782	34.791.000	31.565.000	63,99	90,73	3.226.000	9,27	
3.3.3.1	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	54.365.782	34.791.000	31.565.000	63,99	90,73	3.226.000	9,27	
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	Kepala Dinas
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	11.041.145.886	11.154.106.760	10.241.726.165	101,02	91,82	912.380.595	8,18	Kepala Dinas
5.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Indeks Profesionalitas ASN PD	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	Sekretaris
		Nilai AKIP PD	1.041.145.886	1.154.106.760	0.241.726.165	101,02	91,82	912.380.595	8,18	Sekretaris
5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	24.641.320	5.629.000	5.607.000	22,84	99,61	22.000	0,39	
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.133.200	1.162.800	1.155.500	6,08	99,37	7.300	0,63	
5.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1.458.280	1.052.640	1.049.000	72,18	99,65	3.640	0,35	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
	Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
5.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.458.280	1.052.640	1.049.000	72,18	99,65	3.640	0,35	
5.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.308.280	1.227.640	1.224.000	93,84	99,70	3.640	0,30	
5.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.283.280	1.133.280	1.129.500	88,31	99,67	3.780	0,33	
5.1.2	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	8.534.721.416	8.886.397.460	8.006.863.606	104,12	90,10	879.533.854	9,90	
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.440.844.616	8.799.665.660	7.920.971.806	104,25	90,01	878.693.854	9,99	
5.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.480.000	80.480.000	80.030.000	94,15	99,44	450.000	0,56	
5.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.190.000	3.095.000	3.095.000	73,87	100,00	-	0,00	
5.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1.366.200	1.366.200	1.366.200	100,00	100,00	-	0,00	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
		Tahun SKPD								
5.1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	605.000	215.000	0,00	35,54	390.000	64,46	
5.1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.840.600	1.185.600	1.185.600	41,74	100,00	-	0,00	
5.1.3	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	94.554.000	50.390.000	49.435.977	53,29	98,11	954.023	1,89	
5.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.140.000	1.820.000	1.250.000	29,64	68,68	570.000	31,32	
5.1.3.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.426.000	2.650.000	2.525.000	77,35	95,28	125.000	4,72	
5.1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.988.000	45.920.000	45.660.977	54,03	99,44	259.023	0,56	
5.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	118.084.000	114.652.500	93.669.534	97,09	81,70	20.982.966	18,30	
5.1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.753.000	28.988.000	28.218.000	91,29	97,34	770.000	2,66	
5.1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65.895.000	65.765.000	45.652.034	99,80	69,42	20.112.966	30,58	
5.1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	20.436.000	19.899.500	19.799.500	97,37	99,50	100.000	0,50	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% DPA / Renstra	% Realiasi Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
		Disediakan								
5.1.5	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	2.269.145.150	2.097.037.800	2.086.150.048	92,42	99,48	10.887.752	0,52	
5.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	62.820.450	57.820.450	55.335.856	92,04	95,70	2.484.594	4,30	
5.1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	214.204.700	189.783.350	183.047.454	88,60	96,45	6.735.896	3,55	
5.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.440.000	1.220.000	1.200.000	50,00	98,36	20.000	1,64	
5.1.5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.989.680.000	1.848.214.000	1.846.566.738	92,89	99,91	1.647.262	0,09	
			24.871.803.298	23.604.534.260	19.138.836.846	94,90	81,08	4.465.697.414	18,92	

e. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas P2KBP3A tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16. Analisis Capaian Program Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,87	72,9	114,14	Tercapai
1.1.	PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,33	2,18	106,88	Tercapai
1.1.1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	3	3	100,00	Tercapai
1.1.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2	2	100,00	Tercapai
1.1.1.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	1	100,00	Tercapai
1.1.1.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	12	100,00	Tercapai
1.2.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)	83,1	89,26	107,41	Tercapai
		Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	29,68	14,55	203,99	Tercapai
		Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	100	34,47	34,47	Tidak Tercapai
1.2.1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	73,70	73,70	Tidak Tercapai
1.2.1.1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	24	24	100,00	Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		dan Keluarga Berencana)				
1.2.1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10	3	30,00	Tidak Tercapai
1.2.1.3	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	2	50,00	Tidak Tercapai
1.2.1.4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	26	20	76,92	Tidak Tercapai
1.2.2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	11,8	9,7	82,20	Tidak Tercapai
1.2.2.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	52	50	96,15	Tidak Tercapai
1.2.2.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2	2	100,00	Tercapai
1.2.3.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah laporan kinerja pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana	10	10	100,00	Tercapai
1.2.3.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	979	960	98,06	Tidak Tercapai
1.2.4.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan	Persentase kehamilan yang tidak direncanakan	11,1	24,6	221,62	Tidak Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota					
1.2.4.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	2	100,00	Tercapai
1.2.4.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3249	2,747	84,55	Tidak Tercapai
1.2.4.3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5	5	100,00	Tercapai
1.2.4.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	2	100,00	Tercapai
1.3.	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	85,71	83,5	97,42	Tidak Tercapai
		Indeks Lansia Berdaya	59,87	66,8	111,58	Tercapai
1.3.1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	100	96,43	96,43	Tidak Tercapai
1.3.1.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8	7	87,50	Tidak Tercapai
1.3.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10	10	100,00	Tercapai
1.3.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	10	10	100,00	Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	yang tersedia				
1.3.2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berperan serta aktif dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	392	392	100,00	Tercapai
1.3.2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	100	100	100,00	Tercapai
1.3.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3825	8790	229,80	Tercapai
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	94,98	94,96	99,98	Tidak Tercapai
2.1	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Daerah	70,29	34,53	49,13	Tidak Tercapai
2.1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelembagaan PUG (melalui pelatihan, bimtek, pendampingan	30	30	100,00	Tercapai
2.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1	1	100,00	Tercapai
2.1.1.2	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPDKab/kota yang mendapatkan pendampingan	30	30	100,00	Tercapai
2.1.1.3	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non	1	1	100,00	Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		pemerintah)				
2.1.1.4	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	30	30	100,00	Tercapai
2.1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi berbasis gender	30	30	100,00	Tercapai
2.1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	60	60	100,00	Tercapai
2.2	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100,00	Tercapai
2.2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	85	83	97,65	Tidak Tercapai
2.2.1.1	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	75	75	100,00	Tercapai
2.2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7	6	85,71	Tidak Tercapai
2.2.2.1	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	20	0	0,00	Tidak Tercapai
2.2.2.2	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	100,00	Tercapai
2.2.2.3	layanan pendampingan tenaga ahli bagi	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau	8	9	112,50	Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				
2.2.2.4	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	1	50,00	Tidak Tercapai
2.2.2.5	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	100	83	83,00	Tidak Tercapai
2.2.2.6	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	11	17	154,55	Tercapai
2.2.2.7	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	11	83	754,55	Tercapai
2.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan	2	2	100,00	Tercapai
2.2.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	100	100	100,00	Tercapai
2.3	PENGLOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak yang terintegrasi dalam SI	100	100	100,00	Tercapai
2.3.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	2	2	100,00	Tercapai
2.3.1.1	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	2	100,00	Tercapai
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	629	550,2	87,47	Tidak Tercapai
3.1	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan hak anak	61,81	70,16	113,51	Tercapai
3.1.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga	Peningkatan skor/indeks komponen kelembagaan	119,328	94,5	79,19	Tidak Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)				
3.1.1.1	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20	20	100,00	Tercapai
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan anak yang dilaksanakan	3	3	100,00	Tercapai
3.2.1	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100,00	Tercapai
3.2.2	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2	2	100,00	Tercapai
3.2	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Median Usia Kawin Perempuan (MUKP)	22,5	22,5	100,00	Tercapai
3.2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan penyuluhan atau kelas keluarga sadar gender dan ramah anak	1	1	100,00	Tercapai
3.2.1.1	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	100,00	Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	yang ditetapkan oleh pemerintah.					
3.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga (kader/fasilitator/relawan) yang mendapat pelatihan terkait KG dan hak anak	1	1	100,00	Tercapai
3.2.2.1	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	100,00	Tercapai
3.3	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100,00	Tercapai
3.3.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan sosialisasi/edukasi pencegahan kekerasan	75	75	100,00	Tercapai
3.3.1.1	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	3	3	100,00	Tercapai
3.3.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	8	5	62,50	Tidak Tercapai
3.3.2.2	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	17	18	105,88	Tercapai
3.3.2.3	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	16	51	318,75	Tercapai
3.3.2.4	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2	0	0,00	Tidak Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
3.3.2.5	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	45	4	8,89	Tidak Tercapai
3.3.2.6	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	6	51	850,00	Tercapai
3.3.2.7	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15	0	0,00	Tidak Tercapai
3.3.2.8	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20	11	55,00	Tidak Tercapai
3.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak	2	2	100,00	Tercapai
3.3.3.1	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	100	100	100,00	Tercapai
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Rendah	Sedang	114,26	Tercapai
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	BB	BB	100	Tercapai
5.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Indeks Profesionalitas ASN PD	62,14	71	114,26	Tercapai
		Nilai AKIP PD	76,45	76,45	100,00	Tercapai
5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	5	5	100,00	Tercapai
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	200,00	Tercapai
5.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00	Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
5.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00	Tercapai
5.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00	Tercapai
5.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00	Tercapai
5.1.2	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	6	6	100,00	Tercapai
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	69	100,00	Tercapai
5.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3	100,00	Tercapai
5.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	538	538	100,00	Tercapai
5.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00	Tercapai
5.1.2.5	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	1	100,00	Tercapai
5.1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	100,00	Tercapai
5.1.3	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	3	3	100,00	Tercapai
5.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00	Tercapai
5.1.3.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00	Tercapai
5.1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	11	100,00	Tercapai
5.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	3	3	100,00	Tercapai

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
5.1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	100,00	Tercapai
5.1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	100,00	Tercapai
5.1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100,00	Tercapai
5.1.5	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	4	4	100,00	Tercapai
5.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100,00	Tercapai
5.1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	6	85,71	Tidak Tercapai
5.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	100,00	Tercapai
5.1.5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00	Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, tingkat pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi antar indikator. Secara umum, terdapat indikator yang berhasil mencapai bahkan melampaui target, namun terdapat pula indikator yang belum mencapai target secara optimal.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 sebesar Rp 23.604.534.260 meliputi belanja pegawai Rp. 8.799.665.660 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 13.035.645.921,28 dan belanja modal Rp. 1.769.222.678,72 Realisasi anggaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa mencapai 81,08 % atau sebesar Rp. 19.138.836.846, berikut rincian realisasi anggaran tahun 2025 seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
5	BELANJA DAERAH	23.604.534.260,00	19.138.836.846,00	81,08
5.1	BELANJA OPERASI	21.835.311.581,28	17.371.124.778,00	79,55
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.835.311.581,28	17.371.124.778,00	79,55
5.2	BELANJA MODAL	1.769.222.678,72	1.767.712.068,00	99,91
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.769.222.678,72	1.767.712.068,00	99,91
	JUMLAH BELANJA	23.604.534.260,00	19.138.836.846,00	81,08
	SURPLUS/DEFISIT	(23.604.534.260,00)	(19.138.836.846,00)	81,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(23.604.534.260,00)	(19.138.836.846,00)	81,08

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, maka disajikan jumlah Pagu dan Realisasi anggaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Gizi Balita	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	11.826.543.000	8.353.155.272	70,63
1.1.	PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1.486.650.000	697.677.654	46,93
1.1.1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	1.486.650.000	697.677.654	46,93
1.1.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.050.000	47.183.500	78,57
1.1.1.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	166.600.000	151.200.000	90,76
1.1.1.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan	1.260.000.000	499.294.154	39,63

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
		Pelayanan KB			
1.2.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)	3.113.708.000	2.304.782.068	74,02
		Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	3.050.275.000	1.637.414.410	53,68
		Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	528.000.000	524.370.000	99,31
1.2.1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1.994.575.000	1.085.550.610	54,43
1.2.1.1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1.191.000.000	845.459.657	70,99
1.2.1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	546.210.000	141.105.050	25,83
1.2.1.3	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	72.650.000	41.250.153	56,78
1.2.1.4	Advokasi Program	Jumlah Organisasi	184.715.000	57.735.750	31,26

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
1.2.2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	1.055.700.000	551.863.800	52,27
1.2.2.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	291.200.000	82.701.300	28,40
1.2.2.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	764.500.000	469.162.500	61,37
1.2.3.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah laporan kinerja pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana	528.000.000	524.370.000	99,31
1.2.3.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	528.000.000	524.370.000	99,31
1.2.4.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Persentase kehamilan yang tidak direncanakan	3.113.708.000	2.304.782.068	74,02
1.2.4.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	47.950.000	27.736.000	57,84

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
		Jejaringsnya			
1.2.4.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.021.298.000	2.237.150.318	74,05
1.2.4.3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	14.500.000	12.450.000	85,86
1.2.4.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.960.000	27.445.750	91,61
1.3.	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	2.587.200.000	2.459.170.000	95,05
		Indeks Lansia Berdaya	1.060.710.000	729.741.140	68,80
1.3.1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	1.060.710.000	729.741.140	68,80
1.3.1.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	67.680.000	19.325.500	28,55
1.3.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	863.030.000	582.765.640	67,53
1.3.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	130.000.000	127.650.000	98,19
1.3.2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berperan serta aktif dalam Pembangunan Keluarga Melalui	2.587.200.000	2.459.170.000	95,05

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
	Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
1.3.2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.176.000.000	1.078.210.000	91,68
1.3.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1.411.200.000	1.380.960.000	97,86
2	Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	224.369.000	202.312.349	90,17
2.1	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Daerah	24.130.000	23.690.000	98,18
2.1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelebagaan PUG (melalui pelatihan, bimtek, pendampingan)	9.755.000	9.461.000	96,99
2.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1.720.000	1.646.500	95,73
2.1.1.2	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	2.720.000	2.646.500	97,30
2.1.1.3	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1.720.000	1.646.500	95,73
2.1.1.4	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang	3.595.000	3.521.500	97,96

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
	Kewenangan Kabupaten/Kota	mendapatkan bimtek			
2.1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi berbasis gender	14.375.000	14.229.000	98,98
2.1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	14.375.000	14.229.000	98,98
2.2	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	190.324.000	169.467.099	89,04
2.2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	51.025.000	48.971.532	95,98
2.2.1.1	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	51.025.000	48.971.532	95,98
2.2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	104.510.000	86.343.277	82,62
2.2.2.1	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	2.476.000	-	0,00
2.2.2.2	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	8.700.000	6.375.000	73,28

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
2.2.2.3	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	10.800.000	10.800.000	100,00
2.2.2.4	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	6.480.000	6.391.000	98,63
2.2.2.5	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	15.300.000	8.391.500	54,85
2.2.2.6	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	52.688.000	46.451.277	88,16
2.2.2.7	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	8.066.000	7.934.500	98,37
2.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan	34.789.000	34.152.290	98,17
2.2.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	34.789.000	34.152.290	98,17
2.3	PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak yang terintegrasi dalam SI	9.915.000	9.155.250	92,34
2.3.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	9.915.000	9.155.250	92,34
2.3.1.1	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	9.915.000	9.155.250	92,34

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
3	Terselenggaranya Kabupaten Layak Anak secara Optimal	Skor Kabupaten Layak Anak	399.515.500	341.643.060	85,51
3.1	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan hak anak	82.311.500	80.068.000	97,27
3.1.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan skor/ indeks komponen kelembagaan dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	15.735.000	14.954.500	95,04
3.1.1.1	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	15.735.000	14.954.500	95,04
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan anak yang dilaksanakan	66.576.500	65.113.500	97,80
3.2.1	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.195.500	34.599.500	98,31
3.2.2	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	31.381.000	30.514.000	97,24
3.2	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Median Usia Kawin Perempuan (MUKP)	79.123.000	73.806.000	93,28
3.2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan penyuluhan atau kelas keluarga sadar gender dan ramah anak	77.748.000	72.693.000	93,50
3.2.1.1	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan	77.748.000	72.693.000	93,50

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
	dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
3.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga (kader/fasilitator/relawan) yang mendapat pelatihan terkait KG dan hak anak	1.375.000	1.113.000	80,95
3.2.2.1	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1.375.000	1.113.000	80,95
3.3	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	238.081.000	187.769.060	78,87
3.3.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan sosialisasi/edukasi pencegahan kekerasan	51.035.000	50.305.250	98,57
3.3.1.1	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	51.035.000	50.305.250	98,57
3.3.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	152.255.000	105.898.810	69,55
3.3.2.2	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	30.600.000	26.400.000	86,27

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
3.3.2.3	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	12.240.000	7.231.000	59,08
3.3.2.4	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	8.700.000	-	0,00
3.3.2.5	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	32.400.000	25.107.500	77,49
3.3.2.6	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	56.776.000	39.752.729	70,02
3.3.2.7	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	930.000	-	0,00
3.3.2.8	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10.609.000	7.407.581	69,82
3.3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak	34.791.000	31.565.000	90,73
3.3.3.1	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	34.791.000	31.565.000	90,73
4	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	-	-	0,00

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP PD	11.154.106.760	10.241.726.165	91,82
5.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Indeks Profesionalitas ASN PD	-	-	0,00
		Nilai AKIP PD	11.154.106.760	10.241.726.165	91,82
5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	5.629.000	5.607.000	99,61
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.162.800	1.155.500	99,37
5.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.052.640	1.049.000	99,65
5.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.052.640	1.049.000	99,65
5.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.227.640	1.224.000	99,70
5.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.133.280	1.129.500	99,67
5.1.2	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	8.886.397.460	8.006.863.606	90,10
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.799.665.660	7.920.971.806	90,01
5.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.480.000	80.030.000	99,44
5.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.095.000	3.095.000	100,00
5.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.366.200	1.366.200	100,00

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
5.1.2.5	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	605.000	215.000	35,54
5.1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.185.600	1.185.600	100,00
5.1.3	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	50.390.000	49.435.977	98,11
5.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.820.000	1.250.000	68,68
5.1.3.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.650.000	2.525.000	95,28
5.1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.920.000	45.660.977	99,44
5.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	114.652.500	93.669.534	81,70
5.1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.988.000	28.218.000	97,34
5.1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65.765.000	45.652.034	69,42
5.1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19.899.500	19.799.500	99,50
5.1.5	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	2.097.037.800	2.086.150.048	99,48
5.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57.820.450	55.335.856	95,70
5.1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	189.783.350	183.047.454	96,45

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran
	Operasional atau Lapangan	Perizinannya			
5.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.220.000	1.200.000	98,36
5.1.5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.848.214.000	1.846.566.738	99,91
			23.604.534.260	19.138.836.846	81,08

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2025 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam pelaksanaan pembangunan melalui sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kerja. Laporan ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan terhadap Pengukuran Kinerja Sasaran pada Tahun Anggaran 2025. Hasil pengukuran kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025 masuk dalam kategori berhasil.

LKjIP ini merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan ini kami menyajikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang diharapkan dan semoga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan pelaporan kinerja ini di masa yang akan datang.

Besar harapan kami bahwa LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi upaya kita ke depan untuk membangun Kabupaten Sumbawa ini.